

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kesehatan. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. WHO pada tahun 1986 dalam piagam Ottawa mengatakan bahwa sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi serta fisik. Sedangkan pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.¹

Kesehatan sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial, sebab jika seseorang tidak memiliki tubuh dan pikiran yang sehat maka akan sulit bekerja. Di Indonesia masih banyak masalah kesehatan yang tentunya menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan Negara. Problem kesehatan di Indonesia seperti dikutip pada situs pencerah nusantara, antara lain:²

Problem kapasitas yaitu kurangnya kompetensi tenaga medis, standar pelayanan kesehatan yang rendah, lemahnya kesadaran masyarakat untuk aktif terlibat dalam membangun Indonesia yang lebih sehat; Problem kelembagaan

¹<http://eksistensikesehatan.blogspot.com>. Pengertian Kesehatan Secara Umum. Diakses pada tanggal 2 April 2016 pukul 14.44 WIB

²<http://pencerahnusantara.org>. Masih Banyak Masalah Kesehatan di Indonesia. Diakses pada tanggal 14 April 2016 pukul 19.08 WIB

pelayanan kesehatan, standar profesi dan pelayanan kesehatan; Struktur dan alur kesehatan masyarakat kurang jelas jaminan bagi kaum miskin, marjinal dan perempuan masih kurang, lemahnya integrasi dan sinergi antara pelaku pelayanan kesehatan.

Reformasi dibidang kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa “tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal ”. Dengan meningkatnya tingkat pendidikan dan keadaan sosial dalam masyarakat maka, meningkat pula kesadaran akan arti hidup sehat dan keadaan tersebut menyebabkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, nyaman dan berorientasi pada kepuasan konsumen semakin mendesak dimana diperlukan kinerja pelayanan yang tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, bidang kesehatan menempati urutan kedua (setelah bidang pekerjaan umum) dari bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten

dan kota.³ Ini berarti bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya, dengan memberikan pelayanan yang memuaskan.

Dalam sebuah instansi khususnya di lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Selain itu sebagai sebuah kegiatan komunikasi, humas juga berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif antar berbagai stakeholders instansi, baik internal maupun eksternal dalam rangka membangun image atau citra dari instansi pemerintah itu sendiri. Humas sebagai juru bicara yaitu humas mempublikasikan tentang keunggulan daerahnya meliputi pembangunan pemerintahan serta mendokumentasikan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan dari daerah tersebut. Selain itu humas juga harus dapat menguasai dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam berbagai situasi, selain itu praktisi humas juga dituntut dapat menganalisis opini public dan selanjutnya pada kondisi tertentu dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan kebijaksanaan pimpinan.

Humas juga harus peka untuk mendengar dan melihat segala pendapat dan aspirasi dari semua pihak dan mampu untuk membedakan antara yang harus dilakukan dan tidak. Selain itu humas juga sebagai mediator secara internal maupun eksternal sehingga tercipta hubungan yang harmonis. Kompetensi Humas Pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

³Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2)

Negara Nomor: PER/ 12/ M.PAN/08/Tahun 2007 Pasal 21 menyebutkan bahwa ada empat kompetensi utama yang harus dimiliki oleh humas pemerintah yaitu:⁴

1. Kompetensi keterampilan: berbicara persuasive dan menulis efektif;
2. Kompetensi penguasaan wawasan: pemahaman media berita, pemahaman tentang aspek keuangan dan bisnis, pemahaman tentang proses manajerial;
3. Kompetensi manajerial: kecakapan dalam pemecahan masalah, kecakapan dalam pengambilan keputusan, kecakapan dalam menangani orang/publik;
4. Kompetensi profesionalisme: stabilitas emosi, berfikir logis dan kreatif, penyimak yang baik, antusiasme atas banyak hal, rasa ingin tahu ilmiah, penampilan dan etiket, beretika professional.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Magetan, khususnya Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan merupakan suatu lembaga atau instansi yang memegang peranan penting dalam hal pelayanan kesehatan dan pelayanan social pada masyarakat, banyaknya masalah kesehatan yang terjadi sehingga membuat Dinas Kesehatan diharuskan dapat menangani masalah yang ada, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pemeliharaan kesehatan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terlihat pada daerah di kecamatan poncol Kabupaten Magetan, seperti mandi, mencuci dan Baung Air Besar (BAB) disungai. Kebiasaan BAB di sungai itu dulu bersifat turun-temurun, tetapi saat ini sudah berkurang jauh. Itu pun permasalahannya karena fasilitas MCK yang minim (Hasilobservasi, 2015).

⁴Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/ 12/ M.PAN/08/Tahun 2007 Pasal 21

Selain itu, kondisi tersebut karena kebiasaan masyarakat meski sebagian di antaranya telah memiliki kamar mandi di rumah. Di sejumlah desa di kecamatan poncol warga setempat sengaja membuat kakus di sepanjang aliran sungai, tak jauh dari kakus terdapat tembok berumpak sepanjang kurang lebih dua meteran atau empat meteran yang difungsikan untuk mencuci pakaian, perabotan rumah tangga dan mandi. Atau terkadang juga tempat tersebut dipergunakan untuk BAB sambil mandi, dimana kakus sengaja dibuat untuk memudahkan BAB terutama saat musim penghujan yang airnya deras dan dalam.

Dengan demikian peran humas Dinas Kesehatan sangat penting untuk memberikan informasi kesehatan dan juga mediator jika ada masalah kesehatan di masyarakat dengan tujuan menciptakan masyarakat menuju masyarakat sehat sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten Magetan. Mengacu hasil observasi telah dilakukan melalui media elektronik, seperti radio dan penyuluhan, dialog dan Tanya jawab dengan pendengar. (Hasil observasi, 2015)

Dari penjelasan data diatas yang menjadi perhatian penulis sehingga tertarik untuk meneliti peran Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dituntut untuk menjalankan tugas dengan semestinya karena jika tidak maka instansi tersebut berkerja akan ditinggalkan oleh publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran humas Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan program pemeliharaan kesehatan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran humas Dinas kesehatan Kabupaten Magetan dalam mengimplementasikan program pemeliharaan kesehatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

- 1 Secara akademis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuka wacana baru dalam hal komunikasi dan untuk mahasiswa yang sering melakukan studi terhadap pentingnya komunikasi dapat memperluas cakrawala pengetahuan mengenai peran humas pada organisasi dinas kesehatan.
- 2 Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data atau informasi berkenaan dengan peran Humas Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan program pemeliharaan kesehatan masyarakat oleh kalangan mahasiswa secara umum.